PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL PADA SISWA SMP SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NASIONALISME

Bachtiar Akob - Guntur Arie Wibowo
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa
*e*mail: bachtiarakob@gmail.com - gunturariewibowo@yahoo.co.id

Abstrak

Konsep pendidikan multikultural pada dasarnya apabila diterapkan dengan baik, akan meningkatkan kemampuan baik pengetahuan ataupun sikap siswa. Hal tersebut tentu saja akan meningkatkan pula kapasitas siswa dalam membuka pikiran dan perspektif global tentang isu-isu seperti pemerataan dan keadilan, agama, etnisitas, kerjasama dan konflik, perdamaian, rasisme, budaya dan identitas, hak-hak sipil dan tanggung jawab, kepemimpinan, dan kewarganegaraan.

Dengan kata lain, melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah dan ke depan diharapkan akan diaplikasi di luar sekolah, oleh karena itu tujuan pokok dari pendidikan multikultural adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan sekaligus humanisme. Pendidikan di alam demokrasi seperti Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bangsa yang berlatarbelakang multi-etnic, multi-religion, multi-language dan lain-lain.

Ini berarti, penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan ragam kondisi bangsa yang heterogen. Disinilah perlunya guru ips smp untuk memodifikasi ataupun mengembangkan cara mengajar yang memasukkan lebih banyak informasi budaya pluralistik dan perspektif, yakni dengan cara memasukkan unsur pedagogi kritis, dan membentuk komunitas. Hal tersebut penting sebagai upaya diupayakan agar peserta didik dapat mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Untuk itulah pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural perlu dilaksanakan, hal ini dikarenakan siswa perlu diajarkan bahwa semua sejarah perlu ditafsirkan melalui berbagai sudut pandang dan dari waktu yang berbeda dan tempat. Akhirnya, jika siswa menyadari banyak sudut pandang yang berbeda yang terdapat di dunia ini, mereka dapat mulai memiliki pemahaman multikultural dengan menerima dan menegaskan perbedaan.

Kata Kunci : Multikultural, Nasionalisme, Pembelajaran, Pluralitas.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga merupakan suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter

bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Salah satu komponen penting dalam melaksanakan pendidikan di sekolah adalah guru, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005[1] bahwa: "Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan , melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Seorang guru dituntut tidak hanya bermodal penguasaan materi, tetapi juga harus menjadi motivator sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan juga harus professional dalam menjadi agen pembelajaran yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru, salah satu komponen penting yang harus dimiliki adalah kompetensi professional, yakni menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu[2].

Guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan lebih menguasai kompetensi dan materi daripada guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru harus mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, harus mandiri, juga mampu menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini yakni KTSP. Salah satu alasannya mengapa guru diharuskan mandiri, kreatif, terampil dan memiliki pengetahuan yang luas, dikarenakan pada struktur kurikulum KTSP mempunyai salah satu ketentuan "substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP dan MTs merupakan IPA Terpadu dan IPS Terpadu". Artinya terdapat mata pelajaran SMP dan MTs yang mengalami perubahan yakni penggabungan sehingga guru harus belajar dan menguasai semua rumpun mata pelajaran IPS Terpadu yaitu, ekonomi, geografi, sejarah dan sosiologi.

[1] UU Republik Indonesia, 2006, *UU Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1*, Cipta Jaya, Jakarta, hal 8

[2] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, BSNP, Jakarta, hal 44.

Mata pelajaran IPS Terpadu di SMP memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama.
b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar *survive* seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan[3].

Sehubungan dengan karakteristik IPS Terpadu tersebut, maka IPS merupakan ilmu sosial yang memfokuskan pembelajarannya berkaitan dengan hubungan interaksi antara kehidupan manusia baik dalam lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial budayanya. Agar karakteristik IPS Terpadu dapat diwujudkan, maka diperlukan penanaman konsep multikultural, yakni pendidikan multikultural yang memperhitungkan karakteristik variasi dan identitas etnis yang beragam baik dalam sejarah, budaya, sosial dan ekonominya. Hal ini sebagai upaya tindak lanjut atas munculnya berbagai isu-isu seperti pemerataan dan keadilan, agama, etnisitas, kerjasama dan konflik, perdamaian, rasisme, budaya dan identitas, hak-hak sipil dan tanggung jawab, kepemimpinan, kewarganegaraan (NERDC dan UBEC, 2007)[4] dan diharapkan konsep ini dapat mendorong berpikir kritis dan pengembangan siswa dalam setiap masyarakat (Bennet[5], 2007; Reed dan Black[6] 2006).

Kompetensi guru harus dikembangkan, tidak hanya mengajar dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan oleh sebagian besar guru sekolah di Indonesia. Guru hanya akan

[3] Trianto, 2010, *Model Pembelajaran Terpadu*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 174-175.

[4] Ncrdc & Ube (2007*). 9-Year Basic Edueation Cunieulum Social Studies for Junior Secondary 1-3*.ISBN 978-054-059-8

[5] Bennett, C. *I.* (2007) .*Teaching concepts and strategies: The development of positive classroom climates*. In C. I. Bennett (Ed.), *Comprehensive multicultural education: Theory and_ practice* (6th Ed). Boston: Pearson.

[6] Reed, J.J & Black, D.J (2006). *Towards pedagogy of transformative teacher education*: World Educational links. Multicultural Education

berdiri di hadapan kelas dan memberikan informasi catatan yang ditulis pada papan dan siswa diharapkan untuk mencatat sambil mendengarkan ceramah. Metode ini sudah tidak sesuai dan efektif, karena berfokus sepenuhnya pada intelektual atau aspek kognitif dan mengabaikan pengalaman dalam pembelajaran (Lai[7], 2002).

Dalam pembelajaran IPS, yang menjadi salah satu bentuk proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran IPS yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu, diupayakan agar peserta didik dapat mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Dengan pelajaran IPS yang disusun secara terpadu, maka tujuan pendidikan IPS di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inkuiri, mandiri, dan kepedulian sosial dapat dicapai oleh peserta didik di dalam kelas.

Pembelajaran IPS di Indonesia, secara umum masih diajarkan secara terpisah-pisah. Salah satu penyebab hal ini dapat terjadi, karena guru IPS belum memahami penerapan pembelajaran IPS secara terpadu. Menurut salah satu media online yang dilansir oleh Kompasiana.com[8] tanggal 31 Oktober 2011, ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh guru terhadap pelajaran IPS di sekolah, misalnya fasilitas pendukung pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan kebutuhan, masih rendahnya hasil pembelajaran IPS di sekolah, dan ketidaksiapan dari guru yang ada di sekolahnya untuk membelajarkan IPS secara terpadu.

Ada berbagai macam penyebab, mengapa pelajaran IPS masih diajarkan secara terpisah-pisah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu jurnal yakni Paramita Vol. 20 No. 2 yang ditulis oleh Edy Sutrisna dan Wasino[9], yang pertama guru IPS belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menerapkan pendekatan terpadu sebagai akibat pemberlakuan kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 1994 dan kurikulum 1984, yang tidak menggunakan pendekatan terpadu.

[7] Lai, M. (2002).*A study of cooperative leaming in the EFL junior classroom*. Unpublished master thesis. National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan

[8] Ahmad Turmuzi. 2011. *Permasalahan Pembelajaran IPS Terpadu* (MediaOnline). Kompasiana.com. http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/31/permasalahanpembelajaran-ips-terpadu/. Diakses tanggal 15 April 2014

[9] Edy Sutrisna dan Wasino. 2010. *Pembelajaran IPS Dalam Realita Di Era KTSP: Studi Eksplorasi Pelaksanaan Pembelajaran IPS Pada SMP Di Kabupaten Pati*. Paramita Vol. 20 No. 2. Hlm. 179.

Kedua, guru-guru mata pelajaran IPS di sekolah sebagian besar memiliki latar belakang keilmuan IPS yang monolitik, yaitu berasal dari lulusan Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Sosiologi. Hal yang sama diungkapkan oleh Supardi[10] (2011) tentang berbagai macam bentuk kegelisahan dan kesulitan guru IPS dalam membelajarkan IPS secara terpadu. Pertama, kurikulum IPS yang belum menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, kedua kesulitan guru IPS untuk memadukan pelajaran IPS secara terpadu, dan ketiga kesulitan guru IPS untuk melakukan *team teaching* disebabkan karena kendala pembagian tugas dan waktu saat proses pembelajaran di kelas.

> *Preparing teachers to practice democratic education has become a key concern for teacher education programs in the 21st century. Although the factors qualifying democratic education are multiple, researchers and practitioners agree that a true democratic education can hardly be achieved without a multicultural perspective of the teacher*[11].

Jadi adalah penting mempersiapkan gutu untuk mempelajari pendidikan multikultural yang mendasarkan pada demokrasi dan tanpa pilih kasih. Untuk itulah, para ahli pada saat ini dibutuhkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip multikultural dalam program pendidikan guru[12].

Dari latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan pembelajaran multikultural pada mata pelajaran IPS di SMP sebagai upaya meningkatkan nasionalisme?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur (*library research*) yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara ilmiah data-data yang terdapat di lapangan dan literatur-literatur kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian ini, kemudian dipaparkan dan dianalisa secara kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik.* Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variable atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan[13]. Metode ini merupakan

[10] Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 194

[11] Lihat Abdurrahman Şahin, Türkan Çelik and Nurettin Bilgen. 2013. *Effect of Media Literacy on Prospective Social Studies Teacher Multicultural Attitudes*. International Online Journal of Educational Sciences hal 520.

[12] Ibid

[13] Mukhtar dan Erna Widodo,*2000. Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif,* Yogyakarta:

kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis dan mengintepretasikannya[14].

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif mengikuti pendapat Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman[15], aktivitas analisis data meliputi kegiatan *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan,dan abstraksi (dari data kasar) yang ada dalam catatan lapangan. Kegiatan ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, dan dilakukan dengan membuat pemusatan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menyempitkan hasil perolehan data yang luas sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan dapat ditarik simpulan dan memiliki makna tertentu Penyajian data dilakukan dalam bentuk alinea, kalimat, istilah, matriks, dan tabel-tabel.
3. Verifikasi atau Menarik Kesimpulan (*Conclution Drawing/ Verification*) Kegiatan ini sebenarnya telah dimulai sejak awal kegiatan penelitian, dan semakin dipertajam seiring dengan semakin lengkapnya data yang dikumpulkan. Verifikasi pada tahap awal mungkin saja tidak tepat, tetapi akan terus diperbaiki seiring dengan semakin lengkap dan kompleksnya data, dan diakhiri setelah pengumpulan data berakhir.

Ketiga tahap tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Oleh karena itu model analisis yang digunakan adalah analisis interaksi, dimana interaksi antara ketiga komponen tersebut sebagai patokan dalam kegiatan analisis.

C. TINJAUAN TEORETIS

1. Konsep Pendidikan Multikultural

Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sikap bagaimana masing-masing kelompok bersedia untuk menyatu (*integrate)* tanpa mempedulikan keragaman budaya yang dimiliki. Mereka semua melebur, sehingga pada akhirnya ada proses "*hidridisasi*" yang meminta setiap individu untuk tidak

Auyrous, hal. 15.

[14] Winarno Surakhman, *1984. Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung: Tarsito, hal.147

[15] I*bid* Sugiono. Hal 91

menonjolkan perbedaan masing-masing kultur[16]. Secara historis, pendidikan multikultural sejak lama telah berkembang di Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Dalam perkembangannya, gerakan pendidikan tentang budaya majemuk (*multikultural education*) mencapai puncaknya pada dekade 1970/1980-an, terutama di lembaga-lembaga pendidikan Amerika Serikat.

Hampir di setiap lembaga pendidikan di Amerika Serikat prinsip-prinsip kemajemukan etnik dan budaya diusahakan agar diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dalam rangka pembaharuan kurikulum yang menunjang gerakan pendidikan multikultural. Konsep-konsep tentang etnisitas dan nasionalitas dijabarkan kembali dengan tujuan agar gambaran keberadaan jati-diri "etnik seseorang" jelas di mana tempatnya di dalam kebersamaan dan keseluruhan. Seperti yang dikemukakan Rose bahwa kelompok yang anggota-anggotanya memiliki kebersamaan secara unik dalam warisan sosial dan kultural serta kemudian diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya, disebut kelompok etnik. Biasanya mereka mudah diidentifikasi karena memiliki pola-pola keluarga, bahasa, agama dan adapt istiadat yang berbeda dengan yang lainnya serta memiliki kesadaran kelompok yang tinggi[17] .

Oleh karena itu pendidikan multikultural ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional dan antar budaya etnik lainnya. Contohnya : seorang peserta didik dari Aceh harus akrab dengan budaya kelompok etniknya sendiri, akan tetapi ia juga harus mampu berbaur dan akrab dengan budaya etnik lain di luar kelompoknya.

Dari pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan multikultural berperan membentuk pandangan peserta didik tentang kehidupan dan meningkatkan penghargaan terhadap keragaman[18].

Sedangkan Musa Asy'arie mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di

[16] Nadjamuddin Ramly, 2005, *Membangun Pendidikan Yang Memberdayakan dan Mencerahkan* Jakarta:Grafindo, hlm. xiv

[17] James A Banks, *Teaching Strategis for Ethnic Studies* (Boston: Allyn and Bacon Inc, 1987), hlm. 9-10

[18] Anita Lie, *Mengembangkan Model Pendidikan Multicultural*, dapat diakses secara on-line di http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/opini/2921517.htm

tengah-tengah masyarakat plural[19]. Dengan demikian, pendidikan mutikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Suparno bahwa pendidikan multikultural membantu peserta didik untuk mengerti, menerima dan menghargai orang dari suku, budaya dan nilai yang berbeda[20].

Oleh karena itu peserta didik perlu diajak untuk melihat budaya lain sehingga dapat mengerti dan akhirnya dapat menghargai. Modelnya bukan dengan menyembunyikan budaya lain atau menyeragamkan sebagai budaya nasional sehingga budaya lokal hilang. Dalam pendidikan multikultural tiap budaya memiliki nilai sendiri dan kebenaran sendiri, untuk itu diperlukan pemahaman hubungan nilai budaya yang salah satu caranya melalui pendidikan. Pendapat yang lebih lengkap tentang pendidikan multikultural dikemukakan oleh M. Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah[21].

Lebih lanjut Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka[22] . Dengan kata lain, melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah. Oleh karena itu tujuan pokok dari pendidikan multikultural adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan sekaligus humanisme.

Pendidikan di alam demokrasi seperti Indonesia harus berorientasi pada kepentingan bangsa yang berlatarbelakang *multi-etnic*, *multi-religion*, *multi-language* dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa penyelenggara pendidikan harus memperhatikan ragam kondisi bangsa yang heterogen. Wacana pendidikan multikultural sangat penting sebagai salah satu agenda pendidikan masa depan di

[19] Musa Asy'arie, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, dapat diakses secara on-line di http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/opini/46742.htm

[20] Paul Suparno, *Pendidikan Multikultural*, dapat diakses secara on-line di http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546.htm

[21] M. Ainul Yaqin, 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta:Pilar Media, hlm 25

[22] *Ibid.* Ainul Yaqin

Indonesia, terutama dalam mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas. Manusia cerdas tidak hanya cerdik dan berkemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga bermoral, bersikap demokrasi, keadilan dan humanisme. Dengan kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama.

Oleh karena itu sebagai upaya mewujudkan prinsip demokrasi, keadilan dan humanisme dalam pendidikan multikultural di Indonesia perlu diperhatikan, *Pertama*, perbedaan agama di Indonesia, yang merupakan fakta keragaman di negeri ini; *Kedua*, multi-etnis dan corak bahasa yang dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa. Keragaman ini dapat menjadi pemicu konflik dalam konteks nasional jika tidak terakomodir dengan baik. Untuk itu peran pendidikan multikultural sangat menentukan untuk meredam konflik antar etnis; *Ketiga*, perbedaan jenis kelamin dan gender serta status sosial. Pendidikan multikultural dapat mengakomodir perbedaan jenis kelamin dan latar belakang sosial; *Keempat*, perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh orang, baik dilihat secara fisik dan non-fisik. Pendidikan multikultural telah didefinisikan dalam beberapa pendapat yang berbeda oleh berbagai para ahli. Salah satu pendapat awal, yang diterbitkan di 1973, oleh *American Association of Colleges for Teachers Education* (AACTE) :

> *Values cultural pluralism. It rejects the view that schools should seek to melt away cultural differences or the view that schools should tolerate cultural pluralism. Instead, multicultural education affirms that schools should be oriented toward the cultural enrichment of all children and youth through programs rooted to the preservation and extensions of cultural alternatives. Multicultural education recognizes cultural diversity as a fact of life in American society and it affirms that this cultural diversity is a valuable resource that should be preserved and extended. (AACTE, 1973[23]).*

Menurut Banks[24] (1993), pendidikan multikultural setidaknya terkait tiga hal: ide atau konsep, gerakan reformasi, dan proses. Ini adalah ide bahwa semua siswa, terlepas dari tertentu karakteristik seperti ras atau jenis kelamin, harus mengalami pendidikan kesetaraan. Beberapa siswa, karena karakteristik tertentu, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. Oleh karena itu,

[23] AACTE (American Association of Colleges for Teacher Education) (1973). *Statement of multicultural education*. Journal of Teacher Education. Winter, p.264.

[24] Banks, J.A. (1993). *Multicultural education: Characteristics and goals*. In J.A. Banks & C.A. Banks (Eds), Multicultural education: Issues and persoectives_fpp.90-107). Boston: Allyn and Bacon.

pendidikan multikultural adalah gerakan reformasi yang membutuhkan transformasi semua komponen yang saling terkait yang membentuk sekolah-sekolah kita.

Menurut Banks, fungsi pendidikan multikultural di sekolah adalah *"to improve race relations and to help all students acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to participate in cross-cultural interactions and in personal, social, and civic action that will help make our nation more democratic and just"* atau untuk "untuk memperbaiki hubungan ras dan membantu semua siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam lintas budaya interaksi dan personal, sosial, dan kemasyarakatan tindakan yang akan membantu membuat bangsa kita lebih demokratis dan berkeadilan".

2. Mata Pelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama

Sebutan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia merupakan kesepakatan dari para ahli untuk menunjuk istilah lain dari *Social Studies.* Karena itu mata pelajaran (mapel) IPS tidak dapat dilepaskan dari sejarah munculnya mata pelajaran S*ocial Studies* di Amerika Serikat tahun 1962-an. Berangkat dari pemahaman dan kajian serta bagaimana peran mata pelajaran *Social Studies* itu, di Indonesia kemudian diperkenalkan dan dikembangkan mata pelajaran IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran di sekolah yang didesain atas dasar fenomena, masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai cabang Ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan.

Oleh karena itu, IPS dapat dikatakan sebagai studi mengenai perpaduan antara ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora untuk melahirkan pelaku-pelaku sosial yang dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan. Bahan kajiannya menyangkut peristiwa, seperangkat fakta, konsep dan generalisasi yang berkait dengan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial serta potensi daerah. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Jika dikembalikan pada asal IPS, yakni *social*

studies, bisa dicermati penegasan *National Council for Social Studies* (NCSS)[25] tentang definisi *social studies* sebagai berikut.

> *Social studies are the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines asanthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world* (NCSS,1994)

Menurut NCSS[26] (Savage, 1996) mata pelajaran IPS atau Social Studies memiliki tujuan untuk *"the primary purpose of Social Studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decision for the public good as citizens of a culturally diverse democratic society in an interdependent world".* Berdasarkan pendapat NCSS, maka tujuan utama Social Studies ialah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan bernegara dan menjadikan peserta didik sebagai masyarakat yang demokratis dan mampu bekerja sama dengan masyarakat dunia.

Pendapat senada dijelaskan oleh Ross[27] (2006) yang menjelaskan beberapa pendekatan, isi, dan maksud tentang mata pelajaran IPS sebagai kurikulum, yakni:

> *Subject-centered approaches argue that the Social Studies curriculum derives its content and purposes from disciplines taught in higher education. Some advocates would limit Social Studies curriculum ti the study of traditional history and geography while others would also include the traditional social sciences (e.g., anthropology, economics, political science, sociology, psychology). Still other would inter and multidisciplinary areas such as ethnic studies, law, women's studies, cultural studies, and gay/lesbian studies.*

Berdasarkan pendapat Ross, maka mata pelajaran IPS atau yang dikenal dengan *Social Studies* tidak hanya sebatas disiplin ilmu sosial yang terdiri dari antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan hukum namun dapat dikaitkan dengan berbagai multidispliner keilmuan yang terdiri dari suku, gender, budaya, dan penyimpangan sosial.

[25] NCSS (1994). *Curriculum Standards for Social Studies.: Expectations of Excellence*. Washington.D.C.-NCSS. p. 3

[26] Savage, Tom V. 1996. *Effective Teaching In Elementary Social Studies*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. p.9

[27] Ross, E. Wayne (ed). 2006. *The Social Studies Curriculum*. New York: State University of New York Press, Albany. p. 22

Begitu pula dengan tujuan mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat SMP dan MTs, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arnie Fajar[28] (2005), yakni: a. Mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. b. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan c. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Muhammad Numan Somantri[29] (2001) mendefinisikan dan merumuskan tujuan IPS untuk tingkat sekolah sebagai mata pelajaran, yaitu 1) menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara, dan agama, 2) menekankan pada isi dan metode berpikirilmuan sosial, dan 3) menekankan pada *reflective inquiry*. Berdasarkan pendapat Numan Somantri, maka mata pelajaran IPS di tingkat SMP, menekankan kepada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi, agama, metode berpikir sosial, dan inquiry.

Arnie Fajar[30] (2005: 114) menjelaskan beberapa ruang lingkup mata pelajaran IPS di SMP dan MTs yang dapat dikaji oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Sosial dan Budaya
b. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
c. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan
d. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
e. Sistem Berbangsa dan Bernegara

Supardi[31] (2011), menjelaskan dan merumuskan beberapa hal tentang ruang lingkup IPS yang didasarkan kepada pengertian dan tujuan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yakni :

a. Materi kajian IPS merupakan perpaduan atau integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sehingga akan lebih bermakna dan kontekstual apabila materi IPS didesain secara terpadu.
b. Materi IPS juga terkait dengan masalah-masalah social kemasyarakatan dan kebangsaan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan dunia global.

[28] Arnie Fajar. 2005. *Portofolio dalam Pelajaran IPS*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Hal. 114
[29] Muhammad Numan Somantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya. hal 44
[30] *Ibid*. Arnie Fajar. hal 114
[31] Supardi. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal 186

c. Jenis materi IPS dapat berupa fakta, konsep, dan generalisasi, terkait juga dengan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan nilai-nilai spritual.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka tujuan mata pelajaran IPS di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan MTs di Indonesia, merupakan perpaduan dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora, dan masalah-masalah sosial baik berupa fakta, konsep, dan generalisasi, yang difungsikan untuk mengembangkan aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, keterampilan sosial, dan membangun nilai-nilai kemanusiaan yang majemuk baik skala lokal, nasional, dan global.

D. PEMBAHASAN

Mengabaikan multikulturalisme dalam IPS menunjukkan tidak hanya kurangnya dasar pemahaman tentang konsep multikultural tetapi disiplin IPS itu sendiri. Pada dasarnya pendidikan IPS hampir identik dengan pendidikan multikultural, misalnya, konsep utama dari pendidikan multikultural dan prinsip dasar menyeluruh untuk memahami disiplin IPS atau sejarah adalah ide tentang "berbagai perspektif". Konsep ini mengatakan adalah mungkin untuk melihat ide, peristiwa atau era lebih dari satu cara. Sebagai contoh, kekayaan dan kemakmuran yang terbawa oleh revolusi industri di negara ini perlu dipertentangkan dengan eksploitasi pekerja anak, peningkatan penggunaan budak tenaga kerja untuk memasok pabrik tekstil di Inggris, dan juga masalah ekologi yang disebabkan oleh industrialisasi.

Siswa perlu diajarkan bahwa semua sejarah perlu ditafsirkan melalui berbagai sudut pandang dan dari waktu yang berbeda dan tempat. Jika siswa menyadari banyak sudut pandang yang berbeda yang terdapat di dunia ini, mereka dapat mulai memiliki pemahaman multikultural dengan menerima dan menegaskan perbedaan. Posisi guru IPS adalah di bidang sosial untuk membantu mengubah dan merekonstruksi "agenda menuju saling perbaikan pemahaman manusia "(Pahl[32], 1992). Konsep lain yang penting dalam pendidikan multikultural yang harus dianggap sebagai ilmu sosial yang baik adalah pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan penerimaan beberapa identifikasi dan loyalitas di negara-negara tunggal (Cushner[33] et al., 1992). idealnya, berbagai kelompok etnis akan memiliki

[32] Pahl, R.H. 1992. *In our mind's eye?-A commentary on Kenneth Bouiding's address*. The Social Studies. March/April, 56-57.
[33] Cushner, K., McClelland, A., Safford, P. 1992. *Human diversity in education*. New York: McGraw-Hill.

hak yang sama dan dapat menumbuhkan dan kehadiran keyakinan budaya dan tradisi (Suzuki[34], 1979).

Di bawah pluralisme budaya, keragaman harus dianggap positif sebagai kekuatan. Salah satu analogi agar mudah dipahami misalnya adalah alat musik. Alat musik akan terdengar bagus dengan sendirinya ketika digabungkan menjadi bagian dari sebuah orkestra sehingga akan memiliki nilai yang lebih besar. Konsep lain yang terkait multikultural yang membuat untuk kebaikan IPS adalah konsep budaya. Budaya dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dipelajari, tradisi, dan cara hidup bersama dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Sebuah elemen kunci dalam transmisi budaya adalah keluarga. Siswa perlu tahu tentang keluarga mereka, dan apa yang ditinggalkan oleh para pendahulunya dan juga setiap siswa harus "terlihat" untuk melihat di mana nenek moyang mereka masuk ke dalam gambaran sejarah. Kita semua memiliki budaya dan etnis, baik siswa, serta guru, perlu mengeksplorasi persamaan dan perbedaan dalam pengalaman manusia (Singer[35], 1994). Beberapa masalah yang upaya pendidikan multikultural dapat dilihat sebagai mikrokosmos masalah di dunia.

National Council for Social Studies (NCSS, 1982) menyatakan tujuan pendidikan global adalah untuk memberikan perspektif global kepada siswa yakni untuk mengembangkan *"the knowledge, skills, and attitudes to live effectively in a world possessing limited natural resources and characterized by ethnic diversity, cultural pluralism, and increasing interdependence"*. Atau apabila diartikan untuk mengembangkan "pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk hidup efektif di dunia yang memiliki terbatas alami sumber daya dan ditandai dengan keragaman etnis, pluralisme budaya, dan meningkatkan saling ketergantungan ".

Perubahan dalam pembelajaran pendidikan guru IPS yang dibahas oleh NCSS pada tahun 1978 dalam buletin berjudul *Competency Based Teacher Education: Professionalizing Social Studies Teaching* (Felder[36]). Dalam pengantar buletin ini, Felder menunjukkan bahwa terjadi "Defisit profesionalisme" dalam profesi mengajar karena kurangnya pengetahuan dan repertoar perilaku yang diterima secara universal terkait dengan

[34] Suzuki, B. 1979. *Multicultural education: What's it all about? Integrated Education*. Jan.-Apr.. pp.43-50.

[35] Singer, A. 1994. *Reflections on multiculturalism*. Phi Delta Kaopan.76 *(4).* pp. 284-288.

[36] Felder, D. (Ed.). (1978). *Competency based teacher education: Professionalizing social studies teaching*. Washington, D.C.: National Council for the Social Studies.

praktek mengajar. Dalam bab dari bulletin tersebut, Gay[37] (1978) memandang "pendalaman" pendidikan multikultural dalam pendidikan IPS. Menurut Gay, program pendidikan guru harus

> *"more concrete and specific in outlining expectations, objectives, and behavioral consequences of teacher education students relative to multicultural knowledge and skills. In effect, they must ask, and attempt to answer the question: What must social studies teachers know and be able to do in order to teach multicultural education effectively within the parameters of the social studies?"*

Atau dapat diartikan "lebih konkrit dan spesifik dalam menguraikan harapan, tujuan, dan konsekuensi perilaku pendidikan guru dan siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan multikultural. Akibatnya, mereka harus bertanya, dan mencoba untuk menjawab pertanyaan: Apa yang harus guru IPS tahu dan dapat lakukan untuk mengajarkan pendidikan multikultural secara efektif dalam parameter IPS?"

Gay mengakui bahwa daftar kompetensi yang ditetapkan untuk pendidikan multikultural guru IPS, kategori ini adalah: (1) kompetensi konsekuensi; (2) kompetensi pengetahuan; dan (3) kompetensi kinerja. Dalam melihat konsekuensi kompetensi, Gay bertanya, "Apa yang akan siswa ketahui dan dapat lakukan hal yang berbeda sebagai hasil dari yang pernah dialami program studi sosial multikultural? "Contoh kompetensi konsekuensi: "Guru akan meningkatkan kemampuan siswa untuk membuat generalisasi yang valid tentang pengalaman kelompok etnis di Indonesia. "Pada kompetensi pengetahuan, Gay bertanya, "Apa guru IPS perlu tahu cara untuk mengajar multikultural agar efektif dalam etnis dan budaya yang berbeda dari siswa? "Contoh kompetensi pengetahuan : "Guru bisa menggambarkan ekonomi, politik, sosial dan kontribusi estetika beberapa yang berbeda etnis kelompok, baik mayoritas dan minoritas, untuk Sejarah dan Indonesia. "

Untuk melihat kompetensi kinerja, Gay bertanya, "Apa yang harus guru IPS dapat lakukan untuk mengajarkan konten IPS multikultural secara efektif?. "Contoh kinerja kompetensi: "Guru memiliki kemampuan untuk merevisi bahan ajar pembelajaran IPS dan kurikulum untuk menghilangkan bias etnis, penekanan yang berlebihan pada etnis sentris tertentu dengan pengalaman dan perspektif, dan untuk memasukkan lebih banyak informasi budaya pluralistik dan perspektif. "

[37] Gay, G. (1978). *Interfacing CTBE and multicultural education in social studies teacher preparation.* In D. Felder (Ed.), Competency based teacher education: Professionalizing social studies teaching (pp.85-1001. Washington,D.C.: National Council for the Social Studies.

Secara konsep, pendidikan berbasis multikultural dapat dilakukan dengan 2 metode yakni : pedagogi kritis, dan membentuk komunitas belajar.

1. Pedagogis Kritis

Dalam pedagogi kritis, berusaha melibatkan siswa dalam masalah pemecahan sosial dengan memungkinkan mereka untuk berpikir tentang masalah mana yang layak dipecahkan, menurut siapa, untuk tujuan apa, dan siapa yang mendukung (Parker, 2001). Pendekatan kritis ini, adalah prinsip penting dalam pembelajaran berbasis kelas demokrasi multikultural.

Sosio-ekonomi dan keragaman budaya harus dipelajari bersama dengan politik keragaman. Berbagai cerita penting harus diberitahukan kepada siswa, dengan memberikan "gambaran yang lebih jelas dari masyarakat yang sudah tidak sama baik budaya, ekonomi, dan dinamika politiknya " (Apple[38], 1993). Hal ini penting karena meskipun siswa memiliki pemahaman umum bahwa ada beberapa sejarah, mereka jarang mendengar beberapa pendapat atau memeriksa berbagai perspektif tentang peristiwa tersebut (Hahn[39], 2001).

Guru harus memberikan pemahaman kepada siswa dan bantuan kepada siswa untuk mendapatkan keterampilan berpikir kritis untuk belajar tentang multikultural. Penting untuk dicatat bahwa tujuan tambahan pendekatan kritis ini adalah untuk membantu siswa melihat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki beberapa karakteristik tersendiri dan beberapa di antara karakteristik tersebut harus dipertahankan untuk menuju masyarakat multikultural. Pedagogi kritis bekerja pada sebuah kontinuitas dan berkelanjutan. Dengan latihan melalui berpikir kritis, melalui aksi sosial, dan melalui kelompok aksi sosial. Siswa dapat terlibat dalam pemecahan masalah sosial dengan memungkinkan mereka untuk berpikir tentang masalah mana yang layak dipecahkan, menurut siapa, untuk tujuan apa, dan siapa yang mendukung (Parker, 2001; Ball, 2000; Giroux & McLaren, 1994; Apple 1993[40]).

Diskusi adalah salah satu metode yang memfasilitasi pedagogi kritis karena

[38] Apple, M. (1993). Constructing the "Other": Rightist reconstructions of common sense. In C. McCarthy, and Crichlow, W. (Ed.), Race, representation and identity in education. New York, NY: Routledge. P. 26

[39] Hahn, C. (2001). Democratic understanding: Cross-national perspectives. Theory Into Practice, 40(1), 14-22.

[40] Lihat Anand Reddy Marri, 2003, Working Toward Multicultural Democrazy: Three Secondary Social Studies Teacher and Their Practice. Dissertattion Published. University of Wisconsin-Madison.

mendorong peserta untuk ikut serta dan memeriksa beberapa perspektif tentang masalah. Diskusi, seperti didefinisikan oleh Dillon[41] (1994), adalah "bentuk khusus dari kelompok interaksi di mana anggota bergabung bersama dalam mengatasi pertanyaan yang menjadi perhatian bersama, bertukar dan memeriksa pandangan yang berbeda untuk membentuk jawaban mereka, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka, apresiasi atau penilaian mereka, keputusan mereka, resolusi atau tindakan atas masalah di masalah ". Selain itu, pembelajaran guru IPS juga mendukung diskusi sebagai metode pedagogis untuk berbagai alasan, diantaranya :

a. Hal ini dapat membantu kaum muda mengembangkan kelompok keterampilan wacana dan disposisi yang diperlukan untuk kewarganegaraan partisipatif dalam multikultural demokrasi;
b. Dapat meningkatkan berpikir kritis;
c. Ini memperdalam pemahaman penting demokratis isu dan konsep;
d. Ini mengembangkan kelas yang lebih demokratis masyarakat; dan
e. Ini mempengaruhi partisipasi politik di masa depan. (Engle & Ochoa, 1988; Hahn, 1998; Hess, 2002; Harris, 1997; Oliver & Shaver, 1966; Parker, 1996a; Singer, 1997[42]).

2. Membangun Komunitas Belajar

Membangun komunitas belajar akan mengajarkan tentang multikultural karena siswa dapat melanjutkan partisipasi mereka dalam publik. Membangun komunitas belajar berarti guru telah menciptakan iklim saling menghormati untuk membantu siswa membangun hubungan yang positif, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan kemampuan kelompok dalam memecahkan masalah (Browning, Davis, & Retsa, 2000; Nelsen, Lott, & Glenn, 2000[43]).

Untuk membangun komunitas, siswa didorong untuk terlibat dalam diskusi dan berinteraksi sosial dengan siswa lain dari berbagai ras, etnis, budaya, dan kelompok bahasa, untuk membangun pemahaman. Untuk melakukan hal ini, guru dapat membuat struktur kerjasama antar-ras kelompok yang memungkinkan siswa dari berbagai ras dan kelompok etnis untuk berkenalan sebagai individu (Bank[44] et al., 2001). Hal ini penting karena, seperti

[41] Dillon, J. (1994). Using Discussion in Classrooms. Buckingham, England: Open University Press.p. 8

[42] Ibid. Anand Reddy Marri, 2003

[43] Ibid.

[44] Banks, J., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W., Irvine, J.,Nieto, S., Schofield, J., & Stephan, W. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Seattle, WA: University of Washington.

Dewey[45] (1916) menyatakan, dengan menghubungkan dengan orang yang memiliki pandangan yang berbeda dari diri sendiri akan menyelesaikan masalah yang dipelajari. Bahkan di kelas yang homogen, berdasarkan baik pada ras, kelas, atau jenis kelamin, guru dapat membuat kelompok kooperatif yang memungkinkan siswa untuk melihat sebagai individu, bukan perwakilan kelompok tertentu.

Setelah membangun komunitas yang dimulai di dalam kelas, selanjutnya dapat diteruskan membangun komunitas di sekolah dan masyarakat. Ada cara untuk membentuk wacana tersebut di sekolah, yakni dengan cara para orang tua, guru, siswa, dan administrator diminta untuk membayangkan sekolah sebagai masyarakat kecil yang multikultur, kemudian menanyakan pada diri mereka apa artinya visi ini untuk kehidupan total masyarakat di masa mendatang (Perry dan Fraser[46], 1993).

Seperti pedagogi kritis, beberapa studi empiris memberikan bukti bahwa membangun komunitas akan terhubung ke nilai-nilai demokrasi di dalam kelas. Dalam studi SD, Schaps & Lewis[47] (1997) melaporkan bahwa peningkatan rasa kebersamaan yang kausal terkait dengan kepedulian terhadap orang lain dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, ketika guru membangun komunitas di sekolah dan ruang kelas, siswa mulai mengalami apa artinya menjadi penyayang, warga yang terlibat aktif (Wood[48], 1990). Siswa yang berpartisipasi dalam membentuk komunitas, akan menekankan partisipasi egaliter dan resolusi konflik dengan diskusi dan empati terhadap orang lain, belajar keterampilan untuk melakukan sendiri di dalam kehidupan masyarakat multikultur yang luas (Le Tendre[49], 1999).

Penutup

Secara umum mengembangkan kompetensi guru adalah sebuah keharusan, guru tidak hanya mengajar dengan metode konvensional yang selama ini dilakukan oleh sebagian besar guru sekolah di Indonesia, yakni ceramah, mencatat atau menulis dan menghafalkan, namun. Guru harus mengajar secara sistematis, komprehensif, dan terpadu sebagaimana

[45] Dewey, J. (1916). Democracy and education. New York, NY: Macmillian.

[46] Perry, T ., & Fraser, J. (1993). Reconstructing schools as multiracial/multicultural democracies. In T. Perry, and Fraser, J.W. (Ed.), Freedom's Plow: Teaching in the Multicultural Classroom. New York, NY: Routledge.

[47] Schaps, E., & Lewis, C. (1997). Building classroom communities. Thrust for Educational Leadership, 27(1), 14

[48] Wood, G. (1990). *Teaching for democracy. Educational Leadership*, 48(3) .

[49] Le Tendre, G. (1999). *Community-building activities in Japanese schools: Alternative paradigms of the democratic school. Comparative Education Review*, 43(3), 283-310.

yang tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu, diupayakan agar peserta didik dapat mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Untuk itulah pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural perlu dilaksanakan, hal ini dikarenakan siswa perlu diajarkan bahwa semua sejarah perlu ditafsirkan melalui berbagai sudut pandang dan dari waktu yang berbeda dan tempat.

Jika siswa menyadari banyak sudut pandang yang berbeda yang terdapat di dunia ini, mereka dapat mulai memiliki pemahaman multikultural dengan menerima dan menegaskan perbedaan. Posisi guru IPS adalah di bidang sosial untuk membantu mengubah dan merekonstruksi "agenda menuju saling perbaikan pemahaman manusia. Konsep lain yang penting dalam pendidikan multikultural yang harus dianggap sebagai ilmu sosial yang baik adalah pluralisme budaya. Pluralisme budaya merupakan penerimaan beberapa identifikasi dan loyalitas di negara-negara tunggal. Idealnya, berbagai kelompok etnis akan memiliki hak yang sama dan dapat menumbuhkan dan kehadiran keyakinan budaya dan tradisi. Dalam hal ini unsur pendidikan berbasis multikultural yang dimaksud adalah pedagogi kritis, dan membentuk komunitas.